
PENGARUH KEBIJAKAN PPKM DARURAT 3-20 JULI 2021 TERHADAP PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

Anisa Pratiwi¹, Ari

Abstrak

Setiawan², Yasindy Risma

Hani³

Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas

17 Agustus 1945 Jakarta

email: anisaaaaa.pr@gmail.com

email : ars.setiawan99@yahoo.com

email : yasindyrh@gmail.com

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan mulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di tengah pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk menekan penularan virus Covid-19 terutama dilingkungan keluarga. Meski demikian tidak semua masyarakat dapat menerima kebijakan PPKM Darurat ini dikarenakan hal-hal yang bertentangan dengan situasi masyarakat saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana opini masyarakat terhadap kebijakan PPKM Darurat dari pemerintah serta mengetahui harapan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih sesuai kedepannya. Dalam penelitian ini akan menggunakan survey melalui kuesioner. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan PPKM Darurat, Opini Publik, Implementasi Kebijakan

A. PENDAHULUAN

Pandemi yang terjadi secara global ini bukan hanya menyerang sistem imun kekebalan tubuh, namun juga berefek pada sektor ekonomi, pembangunan, pendidikan bahkan merambah hingga sector perpolitikan. Pada bulan Mei 2020 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan New Normal, karena kasus penyembuhan sudah mulai meningkat secara signifikan. Selain daripada itu tujuan dari New Normal ini supaya masyarakat bisa berkompromi dan hidup berdampingan dengan Covid-19 sehingga masyarakat sudah bisa kembali bekerja supaya tetap produktif berprestasi untuk menopang perekonomian Indonesia, namun harus tetap mengutamakan protocol kesehatan.

Bersamaan dengan berjalannya kebijakan New Normal ini rupanya virus Covid-19 memunculkan virus Covid-19 varian baru hingga sampai pada Cluster baru. Dengan munculnya virus varian baru dan Cluster baru ini menyebabkan kenaikan kasus positive virus Covid-19 yang sangat signifikan terutama di Jawa dan Bali. Hingga pada akhirnya sampai pada puncak kasus yang terbesar berada pada tanggal 19 juni 2021 yaitu bertambah 12.906 kasus positif dan semakin

meningkat secara drastis. Pemerintah dengan cepat mengambil langkah awal untuk membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) untuk mensiasati peningkatan kasus positive Covid-19 yang melampaui kenaikan rata-rata. Bisa disebut bahwa lonjakan kasus ini ialah Covid-19 gelombang 2, dimana angka kenaikan positive yang terbilang sangat tinggi hingga 18.872 kasus pada tanggal 25 Juni 2021 (Kompas.com).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali untuk menekan laju penularan virus corona (Covid-19). PPKM darurat ini berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Sebelumnya Jokowi menyebut PPKM Darurat ini akan berlaku di 6 provinsi dan 44 kabupaten di Jawa-Bali. Penerapan aturan baru ini tak terlepas dari lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Satgas Covid-19 menyatakan Indonesia telah memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19. Hal ini ditandai dengan melonjaknya kasus positif harian hingga menyentuh rekor 21.342 kasus pada Minggu 27 Juni 2021 dan 21.807 kasus pada Rabu 30 Juni 2021.

Selain itu, kasus positif ini telah melampaui lonjakan yang sempat terjadi pada Januari lalu. Saat itu, laju penularan Covid-19 dalam sepekan mencapai 89.902 kasus. Sementara, dalam sepekan ini, jumlah kasus mencapai angka 125.396. Hingga kemarin, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.178.272 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.880.413 orang dinyatakan sembuh, 58.491 orang meninggal dunia, dan 239.368 orang dalam perawatan maupun isolasi mandiri. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto juga telah mengumumkan penerapan PPKM Darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto di akun Instagram resminya, Kamis 1 Juli 2021.

Berikut aturan pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM Darurat:

- 1) Sektor non-esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH).
- 2) Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online.
- 3) Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.
 - a. Cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
 - b. Sementara itu, cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
 - c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat,

dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam.

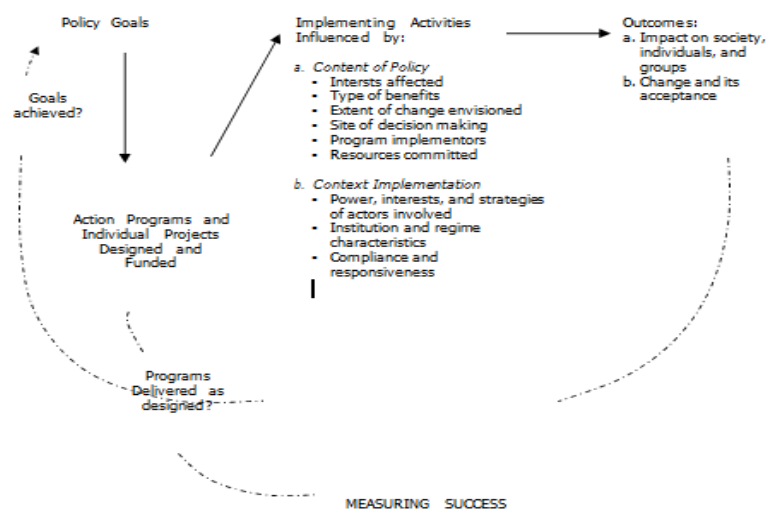
- 4) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.
- 5) Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in).
- 6) Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 7) Tempat ibadah seperti masjid, mushala, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
- 8) Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara.
- 9) Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
- 10) Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa (rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 11) Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
- 12) Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
- 13) Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.
- 14) Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

B. KERANGKA TEORI

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, hal ini dapat dilihat dari kebijakan PPKM Darurat yang diambil dengan menimbang bersama beberapa aktor seperti Menteri Kesehatan, pihak Rumah Sakit di Indonesia, tenaga medis dan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, sedangkan proses

administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu yaitu pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat yang telah diterapkan sejak 3 hingga 20 Juli 2021.

T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2).



Implementation as a Political and Administrative Process

(Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Apakah PPKM

Darurat ini mencapai ketiga aspek tersebut menjadi pertanyaan peneliti dalam jurnal ini.

Dalam tahap ini peneliti ingin mengetahui pandangan publik terhadap kebijakan PPKM sebagai output dari kebijakan tersebut. Opini Publik adalah : Gambaran sikap orang-orang terhadap sesuatu hal (isu) yang terjadi pada satu grup sosial yang sama (Leonard W. Doob). Akhirnya dalam mengartikan opini publik, diperlukan persetujuan bersama tentang apa yang harus ada dalam opini publik tersebut. Pertama, harus ada isu yaitu kebijakan PPKM Darurat. Kedua, harus ada jumlah individu yang signifikan untuk memberi respon terhadap isu tersebut, yaitu responden dalam survey tersebut. Ketiga, harus ada konsensus mengenai isu tersebut dan terakhir harus ada pengaruh yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu hasil survey yang di dapatkan sebagai pengukuran pengaruh kebijakan PPKM Darurat terhadap masyarakat. Salah satu teknik yang paling umum penelitian kuantitatif adalah survei di mana peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari kelompok besar orang.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pertama adalah yang dilakukan oleh Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P pada tahun 2020 dengan mengambil judul “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di kota Denpasar (Pujaningsih:2020).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kedua adalah yang dilakukan oleh Fitasari Putri Purwandini pada tahun 2017 dengan mengambil judul “Analisis Isi Opini Publik Tentang Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Kegiatan Analisis Isi Opini Publik ini akan mengamati aspek pemberitaan Informasi Dasar (Basic Needs) serta aspek kebijakan pengelolaan Informasi Dasar. Kegiatan ini tidak bermaksud menguji kedua aspek tersebut. Kegiatan ini pada satu sisi hanya melakukan analisis isi terhadap pemberitaan Informasi Dasar yang ada di surat kabar. Analisis isi opini publik ini menggunakan rujukan Teori Agenda Setting pada First Level Agenda Setting (Purwandhini:2017).

1) Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu

Penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat, konsep kebijakan yang sama dan juga isi kebijakan tersebut.

Penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas opini publik yang terbentuk setelah diterapkannya kebijakan pemerintah tersebut.

2). Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah perbedaan dari pokok pembahasan. Penelitian pertama hanya berfokus pada kebijakan yang diterapkan namun tidak membahas mengenai opini publik setelahnya. Sedangkan dengan penelitian kedua jurnal ini sama-sama membahas opini publik namun berbeda kebijakan pemerintah yang diambil serta metode pengambilan datanya, Karena jurnal ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner untuk mengambil data.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode verifikatif digunakan untuk menguji teori dan penelitian akan mencoba menghasilkan untuk mengetahui pengaruh kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 terhadap pembentukan opini publik masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Metode verifikatif akan menghasilkan kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak.

1. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan atau mengarahkan dalam menyusun alat ukur data yang diperlukan berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang telah dikemukakan batasan operasional dari masing-masing variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu:

- (1) Variabel independen (variabel bebas), yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam hal ini yang dijadikan variabel independennya adalah Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (variabel X).
- (2) Variabel dependen (variabel terikat), yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel dependennya adalah Opini Publik Masyarakat (variabel Y).

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<p><i>Kebijakan Pemerintah</i></p> <p>Variabel (X)</p>	<p>Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik</p>	<p><i>PPKM Darurat</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat 2. Pemerintah terus meningkatkan fasilitas penunjang kesehatan selama PPKM Darurat berlangsung 3. Pemerintah menyatakan penilaian situasi pandemi pada kabupaten/kota yang ada di Indonesia 4. Cakupan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur melalui Kebijakan Pemerintah 5. Saran terkait pembentukan tim khusus untuk menangani penyebaran Covid-19 di Jabodetabek 	

<p><i>Opini Publik</i></p> <p>Variabel (Y)</p>	<p>Opini Publik adalah apayang dipikirkan sebagai pandangan dan perasaan yang sedang berkembang di masyarakat tertentu mengenai setiap isu yang menarik perhatian rakyat.</p>	<p><i>Pendapat Masyarakat terkait PPKM Darurat</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini atas PPKM Darurat dapat mengurangi penyebaran Covid-19 2. Opini atas pemerintah perlukah membentuk tim khusus untuk menangani penyebaran Covid-19 di Jabodetabek 3. Opini atas pelaksanaan PPKM Darurat terhadap penutupan di beberapa jalan 4. Opini atas kurang memihaknya PPKM Darurat terhadap pelaku UMKM yang dilakukan oleh masyarakat 5. Opini atas fasilitas penunjang kesehatan sudah memadai saat PPKM Darurat 6. Opini atas perbandingan antara lockdown dan PPKM Darurat 7. Opini atas sanksi 	
--	---	--	---	--

			bagi pelanggar PPKM Darurat 8. Opini atas bantuan pemerintah saat PPKM Darurat 9. Opini atas efektivitas terhadap pengelolaan dan pengawasan kebijakan PPKM Darurat 10. Opini atas pemerataan PPKM Darurat telah berjalan oleh semua lapisan masyarakat	
--	--	--	--	--

Sumber : Operasionalisasi variabel penelitian

Berdasarkan operasionalisasi variabel penelitian di atas, kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan dalam bentuk kuesioner, di mana pertanyaan ini berbentuk pertanyaan tertutup yang masing-masing jawabannya diukur berdasarkan pengukuran skala *Likert*, dengan kisaran 1-4. Variabel-variabel penelitian diukur dalam skala dengan bobot perincian nilai berikut:

Tabel 2
Bobot Variabel

Variabel	Bobot (Positif)	Bobot (Negatif)
Kebijakan PPKM (X)	1	4
	2	3
	3	2
	4	1
Opini Publik (Y)	1	4
	2	3
	3	2
	4	1

Sumber : Bobot variabel penelitian

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia. Adapun sampel yang diambil secara khusus yaitu daerah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Sampel

No	Nama Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jakarta Barat	7	5	12
2	Jakarta Pusat	11	8	19
3	Jakarta Selatan	7	8	8
4	Jakarta Timur	3	5	8
5	Jakarta Utara	7	10	17
6	Kepulauan Seribu	6	1	7
7	Lainnya	16	19	33
Total		57	49	106

Pengklasifikasian responden selanjutnya adalah berdasarkan domisili. Mayoritas responden berdomisili di luar DKI Jakarta namun tetap menerapkan PPKM Darurat di daerahnya. Responden dari luar DKI Jakarta sebanyak 33 orang atau 31.1%, Jakarta Pusat 19 responden atau 17.9%, Jakarta Utara 18 responden atau sebanyak 17%, Jakarta Barat dengan 12 responden atau sebanyak 11.3%, Jakarta Selatan dengan responden atau sebanyak 8.5%, Jakarta Timur dengan 8 responden atau sebanyak 7.5% dan yang terakhir adalah Kepulauan Seribu dengan 7 responden atau sebanyak 6.6%.

1. Sampel

$$n = N$$

$$Ne^2 + 1$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel minimum.

N : Jumlah populasi (populasi sampling).

e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketelitian karena pengambilan sampel populasi), di mana batas kesalahan ditentukan sebesar 10.

Sehingga dengan mempergunakan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel minimum, yaitu:

$$N = \frac{598,198}{(0,10)^2 + 1} = 99,983 \approx 100$$

Dengan demikian, berdasarkan kuesioner yang telah peneliti bagikan kepada masyarakat diperoleh hasil sebanyak 106 responden yang terbagi secara proporsional ke dalam 6 wilayah kota/kabupaten dan juga daerah lainnya.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2004:109), "Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti". Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai salah satu derajat ketepatan pengukuran tentang isi dari pernyataan yang penulis buat. Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien *korelasi product moment*. Skor ordinal dari setiap *item* pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan item, jika koefisien korelasi tersebut itu positif, maka item tersebut valid, sedangkan jika negatif maka item yang tersebut tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuesioner atau digantikan dengan pernyataan perbaikan. Rumus uji validitas antara lain:

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2) - (n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi *pearson product moment*

X_i : Skor responden i pada pertanyaan X
 Y_i = Skor total pertanyaan responden i

n : Jumlah responden

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi adalah pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur terpercaya (*reliabel*). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh hasil pengukuran dapat dipercaya yang berarti skor hasil pengukuran tersebut dari kekeliruan pengukuran. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas (*Alpha Cronbach*). Apabila datanya benar sesuai dengan kenyataannya maka berapa kali pun diambil tetap akan sama.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana dalam analisis data. Hal ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel *survey kebijakan PPKM Darurat (X)* dan pembentukan *opini publik (Y)*. Dampak dari penggunaan regresi ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan variabel independen, atau untuk meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen atau sebaliknya. Model regresi yang digunakan yaitu :

$$\hat{Y} = a + bx$$

Keterangan :

X : Variabel Survey Kebijakan PPKM Darurat (independen)

\hat{Y} : Variabel Pembentukan *Opini Publik*

(dependen) a : Intersep model

Dimana untuk mencari nilai-nilai a dan b dalam buku Sugiyono (2004:272) digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\Sigma Y_i)(\Sigma X_i^2) - (\Sigma X_i)(\Sigma X_i Y_i)}{n \Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \Sigma X_i Y_i - (\Sigma X_i)(\Sigma Y_i)}{n \Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2}$$

4. Koefisien Korelasi Pearson

Untuk mengetahui korelasi kedua variabel digunakan rumus Koefisien Korelasi Pearson, yang digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara *survey kebijakan PPKM Darurat* terhadap pembentukan *opini publik* dengan rumus sebagai:

Keterangan:

$$r = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x - \Sigma y}{\sqrt{\{(\Sigma x^2) - \{\Sigma x\}^2\} \{(\Sigma y^2) - \{\Sigma y\}^2\}}}$$

r : Koefisien Korelasi Pearson

X : Variabel hasil *survey* Kebijakan PPKM Darurat (independen)

Y : Variabel Opini Publik (dependen)

n : jumlah responden yang diteliti

Untuk sedikit keterangan, jika $r = 1$, hubungan X dan Y sempurna dan positif (mendekati 1, hubungan sangat kuat dan positif), jika $r = -1$, hubungan X dan Y sempurna dan negatif (mendekati -1, hubungan sangat kuat dan negatif), lalu jika $r = 0$, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada

hubungan. Agar lebih mempermudah disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Kriteria Nilai Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Keeratan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : diperoleh dari sumber Sugiyono (2004: 18)

5. Uji Hipotesis

Peneliti menganalisa data yang diperoleh dari responden setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang diajukan, maka digunakan metode analisis data untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sebelum dilakukan analisis data, perlu dilakukan rancangan pengujian hipotesis terhadap alat pengumpulan data.

Untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat terhadap Pembentukan Opini Publik yang dilaksanakan pada tanggal 3-20 Juli 2021, maka dilakukan suatu uji hipotesis melalui asumsi sebagai berikut:

Keputusan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, terdapat pengaruh signifikan antara X dan Y Sehingga hasil dari pengujian tersebut menghasilkan pembuktian hipotesis berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel X (kebijakan PPKM Darurat) terhadap variabel Y (pembentukan opini publik)

H₀ : $\beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan PPKM Darurat terhadap opini public.

H₁ : $\beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan PPKM Darurat terhadap opini publik.

Dengan menguji dua arah dalam tingkat signifikansi = α (5%), dan derajat kebebasan $df = n-k-1$, dimana n = jumlah observasi dan k = parameter termasuk konstanta. Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Penggunaan uji t untuk mendapatkan thitung menggunakan rumus (J.supranto (2009:116) :

Dengan ketentuan :

B : koefisien regresi

S_{by} : simpangan baku variabel y

N : jumlah sampel

$$t_n = \frac{b}{S_{by}}$$
$$S_{by} = \frac{\sqrt{se^2}}{\sum Xi^2}$$

Pengambilan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Terima Ho : thitung < ttabel ($\alpha = 0,05$)($df = n-2$)

Tolak Ho : thitung > ttabel ($\alpha = 0,05$)($df = n-2$)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan PPKM Darurat

Pengambilan keputusan terkait kebijakan relaksasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 perlu dipersiapkan dengan matang. Selain itu, kebijakan relaksasi itu juga perlu diiringi komitmen dan kesepakatan dari semua unsur pemerintah maupun masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah selama ini menerapkan pola kebijakan yang bersifat pengetatan dan relaksasi atau langkah gas dan rem secara bergantian di penanganan pandemi Covid-19. Selama 1,5 tahun penanganan pandemi, kebijakan pengetatan dan relaksasi dilakukan sebanyak 3 kali. Penerapan aturan PPKM Darurat pada 3 - 20 Juli 2021 menjadi pengetatan yang keempat. Langkah pengetatan aturan pembatasan kegiatan masyarakat biasanya diterapkan selama periode 4-8 pekan, dengan tujuan agar laju penambahan kasus baru menurun. Lantas, kebijakan tersebut akan diikuti dengan relaksasi aturan pembatasan selama sekitar 13-20 pekan. Relaksasi

itu untuk meminimalisir dampak pelambatan ekonomi yang terjadi akibat kebijakan pengetatan.

Dikutip dari Tirto.id menurut Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, kebijakan relaksasi yang tepat penting dipersiapkan secara matang sebab ia dapat menentukan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Ia mengatakan pengambilan keputusan terkait relaksasi musti mempertimbangkan pelajaran dari pengalaman sebelumnya.

Pada periode sebelumnya, kebijakan relaksasi belum diikuti oleh penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan maupun protokol kesehatan yang ideal. Lain itu, kebijakan relaksasi juga kerap disalahartikan sebagai keadaan aman. Persepsi macam itu menyebabkan pelaksanaan protokol dilupakan sebagian orang, dan ujungnya adalah jumlah kasus baru melonjak lagi. akibat dari melemahnya kedisiplinan dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada masa relaksasi, jumlah kasus baru bisa meningkat hingga 14 kali lipat. Hal ini yang harus dijadikan refleksi bersama.

Sebab, kebijakan pengetatan melalui PPKM Darurat yang telah berjalan dalam dua minggu ini telah berdampak positif berupa penurunan tingkat keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR) rumah sakit di wilayah Jawa - Bali. Pada periode yang sama, mobilitas penduduk pun berangsur menurun. Namun, penambahan kasus baru masih tinggi sekalipun kebijakan pengetatan di masa PPKM Darurat sudah menunjukkan hasil. Dalam 24 jam hingga 20 Juli 2021, penambahan harian masih mencapai 38.325 kasus, atau lebih dari 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan periode 3 pekan sebelumnya. Sementara kasus aktif masih sebanyak 542.938 (18,65 persen dari total kasus). Penanganan pandemi di tanah air pun perlu mempertimbangkan kenyataan bahwa kini sudah ada berbagai varian baru Covid-19 (varian of concern) yang masuk ke Indonesia, khususnya varian delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa-Bali (tirto.id, 2021).

Sejauh ini efektivitas kebijakan yang dipercaya dapat meminimalisir penularan kasus Covid-19 ini tak henti diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Hinky Hindra Irawan Satari menjelaskan, efektivitas PPKM Darurat dapat dilihat melalui terjadi atau tidaknya penurunan kasus. Hasil tersebut dapat dipertimbangkan melalui intervensi yang telah dijalankan. Program ini dibuat berdasarkan data yang valid. Route cost analysis, apa akar permasalahannya, memutuskan intervensinya adalah PPKM Darurat, dan menentukan *hipe performance indicator*-nya. Efektivitas kebijakan PPKM Darurat harus sejalan dengan pandangan masyarakat. Harapannya seluruh elemen dapat bekerja sama melawan wabah penyakit menular ini guna memulihkan berbagai sektor kehidupan.

2. Hasil Survey Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat terhadap Opini Publik

Berdasarkan hal tersebut peneliti telah melakukan survey terkait PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 untuk melihat efektivitas dari adanya kebijakan pemerintah ini. Survey ini dilakukan melalui kuesioner yang telah di isi sebanyak 106 responden dari 6 wilayah DKI Jakarta dan berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Berikut lampiran hasil survey dari para responden terkait kebijakan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat 3-20 Juli:

Tabel 7
Hasil Survey Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021

No	Hasil Survey	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3-20 Juli untuk meredam lonjakan signifikan kasus COVID-19.	56.6%	21.7%	17.9%	3.8%
2.	Jajaran Kementerian Kesehatan terus meningkatkan kapasitas Rumah Sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen.	42.5%	40.6%	11.3%	5.7%
3.	Dalam panduan implementasi PPKM Darurat ini, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, cakupan PPKM Darurat terdiri dari 48 Kabupaten/kota, dengan penilaian (assessment) situasi pandemi level 4, dan 74 kabupaten/kota dengan penilaian situasi pandemi level 3 di Jawa dan Bali.	58.5%	6.6%	30.2%	4.7%
4.	Adapun cakupan pengetatan aktivitas masyarakat diantaranya, peraturan bekerja dari rumah atau working from home (WFH) 100 persen untuk sektor non esensial, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kemudian, untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum kerja di kantor atau Working from Office (WFO), dengan protokol kesehatan yang ketat.	56.6%	13.2%	24.5%	5.7%
5.	Anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan memberikan pernyataan pers yaitu “Karena angka kasus positif Covid-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat	60.4%	15.1%	23.6%	0.9%

pelaksanaan PPKM Darurat, untuk mengetahui sumber melonjaknya kasus positif ada di mana. Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang/Tangsel, Depok, Bekasi (JABODETABEK) jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran”				
--	--	--	--	--

Sumber : Data Kuesioner Survey Opini Publik Mengenai PPKM Darurat 3-20 Juli

Berdasarkan hasil survey mengenai kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli menunjukkan bahwa sebagian besar warga Jakarta dan lainnya setuju dengan diadakannya PPKM Darurat di DKI Jakarta, dengan terus meningkatkan kapasitas Rumah Sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen masyarakat percaya PPKM Darurat menjadi solusi untuk menekan laju lonjakan kasus Covid-19. Masyarakat juga setuju dengan diadakannya WFH bagi perusahaan non esensial untuk mengurangi mobilitas warga. Disamping PPKM Darurat yang telah dilaksanakan, masyarakat juga mendukung usulan Anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yaitu pembentukan tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran khusus di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang/Tangsel, Depok, Bekasi (JABODETABEK) untuk menangani penyebaran Covid-19. Ini membuktikan bahwa masyarakat sejatinya sangat mendukung peraturan PPKM Darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah karena dirasa juga dibutuhkan untuk menangani Covid-19.

Tabel 8

Hasil Survey Opini Publik Mengenai Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021

No	Hasil Survey	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Menurut Anda PPKM Darurat dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 ?	54.7%	15.1%	24.5%	5.7%
2.	Menurut Anda pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk menangani penyebaran Covid-19 di Jabodetabek ?	54.7%	19.8%	24.5%	0.9%

3.	Menurut Anda dalam pelaksanaan PPKM Darurat harus sampai menutup akses jalan ?	26.4%	1.9%	54.7%	17%
4.	Menurut Anda PPKM Darurat ini kurang memihak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dilakukan oleh masyarakat ?	25.5%	64.2%	9.4%	0.9%
5.	Menurut Anda kapasitas Rumah Sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan sudah memadai saat PPKM Darurat ?	17.9%	1.9%	44.3%	35.8%
6.	Menurut Anda PPKM Darurat darurat jauh lebih baik dari kebijakan lockdown sebelumnya ?	22.6%	5.7%	57.5%	14.2%
7.	Menurut Anda sanksi yang diterapkan bagi pelanggar PPKM Darurat cukup rasional ?	16%	5.7%	60.4%	17.9%
8.	Menurut Anda bantuan pemerintah saat PPKM Darurat telah berjalan dengan baik ?	13.2%	3.8%	62.3%	20.8%
9.	Menurut Anda pemerintah telah efektif dalam mengelola dan melakukan pengawasan kebijakan PPKM Darurat ?	15.1%	3.8%	66%	15.1%
10.	Menurut Anda PPKM Darurat telah berjalan secara merata pada semua lapisan masyarakat ?	18.9%	6.6%	59.4%	15.1%

Sumber : Data Kuesioner Survey Opini Publik Mengenai PPKM Darurat 3-20 Juli

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3-20 Juli untuk meredam lonjakan signifikan kasus COVID-19. *Polling* dapat dikatakan sebagai barometer atas suara rakyat. Dengan membaca hasil *polling* yang telah di-*release* oleh beberapa lembaga survei, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar warga Jakarta merasa tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam peraturan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.

Sebanyak 54.7% warga Jakarta dan lainnya setuju dengan pernyataan bahwa PPKM Darurat dan pembentukan tim khusus penanganan Covid-19 di Jabodetabek sebagai langkah menurunkan angka positif Covid-19. Namun kita perlu kita lihat lagi mengenai hasil survey terhadap opini publik tentang pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat. Sebanyak 64.2% warga Jakarta dan lainnya setuju terhadap kebijakan PPKM Darurat yang memengaruhi UMKM.

Jika di telaah lagi, dikatakan oleh kata Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun kepada Katadata.co.id bahwa dengan kebijakan PPKM Darurat omzet UMKM akan turun 50-60% dan akan banyak pekerja yang dirumahkan.

Gambar 1
Sumber berita: BBC News



Dilansir oleh BBC News PPKM Darurat juga mendapatkan penolakan pembatasan kegiatan dikarenakan omzet yang sangat anjlok (BBCNews.com, 2021). Hal ini menunjukkan masih adanya kontra dari sejumlah golongan masyarakat DKI Jakarta mengenai kebijakan PPKM Darurat jika dilihat dari aspek perekonomian. Karena pembatasan besar-besaran mengurangi kunjungan yang berdampak pada pendapatan mereka, artinya kebijakan PPKM Darurat belum memihak kepada UMKM. Selanjutnya sebanyak 44.3% warga DKI Jakarta tidak setuju dengan kapasitas Rumah Sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan sudah memadai saat PPKM Darurat. Hasil *survey* yang menunjukkan presentase terbanyak tidak setuju adalah dari pernyataan mengenai keefektifan PPKM Darurat baik dalam isi kebijakan yang dibuat maupun pelaksanaannya.

3. Uji Validitas

Masing-masing indikator pada variabel hasil *survey* Kebijakan PPKM Darurat (X) dan Opini Publik (Y) memiliki nilai koefisien validitas $> 0,1909$, maka disimpulkan bahwa masing-masing indikator pada variabel Kebijakan PPKM Darurat (X) dan Opini Publik (Y) adalah Valid.

Tabel 9

Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisein Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Variabel x	p1	0,303	0,1909	Valid
	p2	0,324	0,1909	Valid
	p3	0,384	0,1909	Valid
	p4	0,293	0,1909	Valid
	p5	0,406	0,1909	Valid
Variabel y	p6	0,444	0,1909	Valid
	p7	0,514	0,1909	Valid
	p8	0,413	0,1909	Valid
	p9	0,553	0,1909	Valid
	p10	0,594	0,1909	Valid
	p11	0,405	0,1909	Valid
	p12	0,274	0,1909	Valid
	p13	0,302	0,1909	Valid
	p14	0,389	0,1909	Valid
	p15	0,480	0,1909	Valid

Sumber : Data diperoleh dari uji validitas penelitian

4. Uji Reliabilitas

Tabel 10
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Kebijakan PPKM Darurat (X)	0,608	0,60	Reliabel
Opini Publik (Y)	0,608	0,60	Reliabel

Sumber : Data diperoleh dari uji realibilitas penelitian

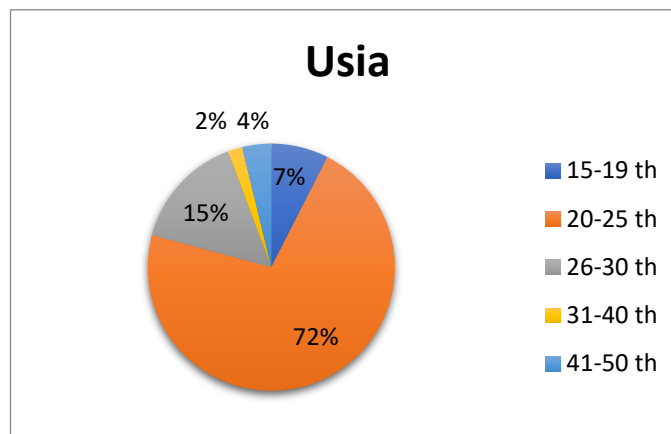
Dalam SPSS diberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Conbarch Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2011:48). Berdasarkan tabel di atas, masing-masing indikator pada variabel hasil *survey* Kebijakan PPKM Darurat (X) dan Opini Publik (Y) memiliki nilai koefisien reliablitas $> 0,6$, maka disimpulkan bahwa masing-masing indikator pada variabel Kebijakan

PPKM Darurat (X) dan Opini Publik (Y) adalah Reliabel.

5. Data Responden

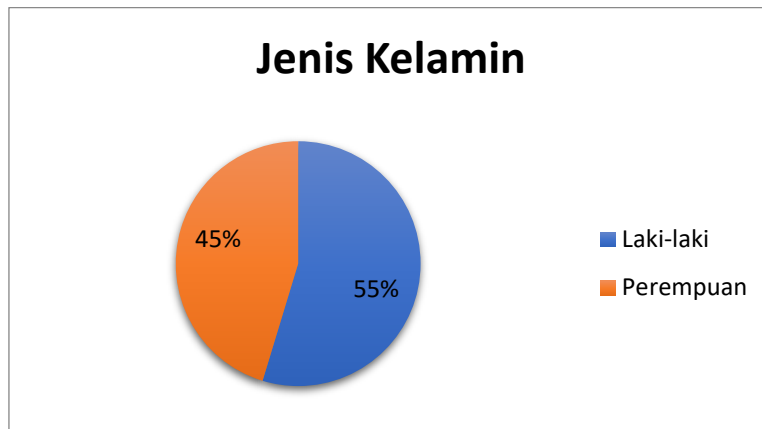
Objek penelitian atau responden dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang melaksanakan kebijakan PPKM Darurat dengan rentang usia 15-50 tahun. Mayoritas kriteria responden adalah rentang usia 20-25 tahun dengan 76 responden atau sebanyak 71.7%, dilanjutkan rentang usia 26-30 tahun responden atau sebanyak 15.1%, 15-19 tahun 8 responden atau sebanyak 7.5%, 41-50 tahun 4 responden atau sebanyak 3.8%, 31-40 tahun 2 responden atau sebanyak 1.9%. . Adapun selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi data responden berdasarkan : Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan.

Diagram 1
Responden Berdasarkan Usia



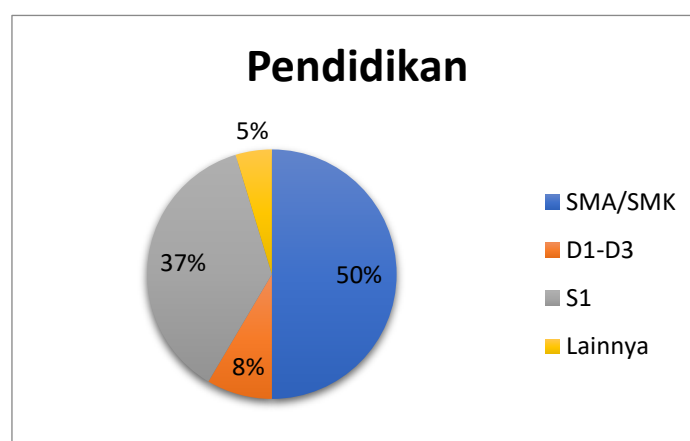
Sedangkan data responden berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak responden pria dibandingkan dengan responden wanita. Pria sebanyak 58 responden atau 55% dan wanita sebanyak 48 responden atau 45 % dari total 106 responden yang menjadi sampel penelitian.

Diagram 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Pengklasifikasian selanjutnya adalah berdasarkan pendidikan para responden. Dikarenakan responden merupakan masyarakat umum, sebagian besar mengenyam pendidikan tingkat atas. Responden dengan pendidikan SLTA mendapatkan persentase tertinggi yaitu 50% atau sebanyak 53 responden, sedangkan pendidikan oleh jenjang Strata 1 (S1) dengan 39 responden atau 36.8%, dilanjutkan D1-D3 sebesar 8.5% atau 9 responden. Pendidikan lainnya seperti: kursus, mengikuti pembinaan/diklat sebanyak 5 responden atau 4.7%.

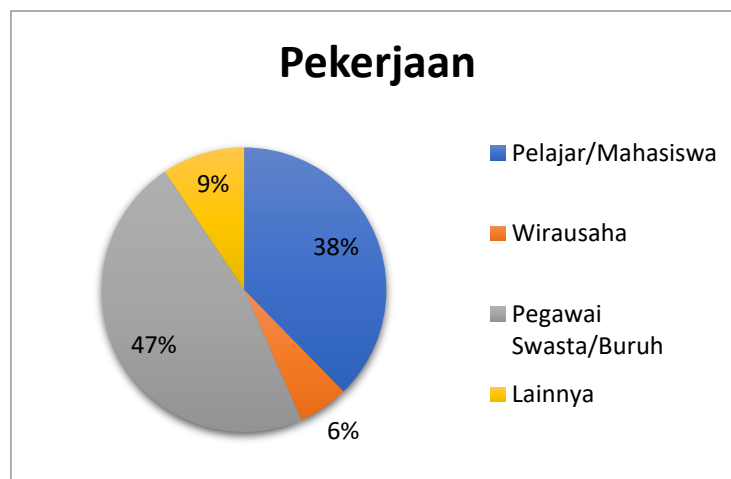
Diagram 3
Responden Berdasarkan Pendidikan



Pengklasifikasian responden selanjutnya adalah berdasarkan pekerjaannya. Mayoritas responden merupakan pegawai swasta/buruh. Responden pegawai swasta/buruh dengan 50 responden atau sebanyak 47.2%, dilanjutkan oleh Mahasiswa sebanyak 40 responden atau 37.7%,

wirausaha dengan 6 responden atau sebanyak 5.7% dan pekerjaan lainnya seperti : SPG, Nelayan, Buruh,dll sebanyak 10 responden atau 9.4%.

Diagram 4
Responden Berdasarkan Pekerjaan



6. Regresi Linear Sederhana

Gambar 2
Hasil Regresi Linear Sederhana dari SPSS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.691	2.084		6.569	<.001
	KEBIJAKAN PPKM DARURAT	.993	.170	.502	5.856	<.001

a. Dependent Variable: OPINI PUBLIK

Dari output *software SPSS 28* di atas diperoleh model regresi sebagai berikut:

- Diketahui nilai Constant (a) sebesar 13.691, sedangkan nilai Kebijakan PPKM Darurat (b/koeffisien regresi) sebesar 0.993 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis

$$Y = a + bX$$

$$Y = 13.691 + 0.993X$$

Rumusan tersebut dapat diterjemahkan:

- Konstanta sebesar 13.691, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Opini Publik adalah sebesar 13.691
- Koefisien regresi X, sebesar 0.993 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Kebijakan PPKM Darurat, maka nilai Opini Publik bertambah sebesar 0.993. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Pengambilan Keputusan dalam Uji Regresi Linear Sederhana:

- Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan PPKM Darurat (X) berpengaruh terhadap variabel Opini Publik (Y).
- Berdasarkan nilai t : diketahui nilai t_{hitung} sebesar $5.856 > t_{tabel}$ 1.985, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan PPKM Darurat (X) berpengaruh terhadap variabel Opini Publik (Y).

7. Uji Hipotesis

Tabel 11
Uji Hipotesis

UJI T

t_{hitung}	t_{tabel}	Sig. Penelitian	Hipotesis	Kesimpulan
5.856 >	0,1985	0,001 < 0,05	Ha diterima Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data diperoleh dari data hipotesis penelitian

UJI F

f_{hitung}	f_{tabel}	Sig. Penelitian	Hipotesis	Kesimpulan
--------------	-------------	--------------------	-----------	------------

34.288	3,93	0,001	Ha diterima	Signifikan
>		< 0,05	Ho ditolak	

Sumber : Data diperoleh dari data hipotesis penelitian

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai signifikan $0,001 < 0,05$ maka H_a diterima sedangkan H_o ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari hasil survey Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat terhadap Pembentukan Opini Publik.

8. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara Hasil Survey Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat dengan Pembentukan Opini Publik, digunakan analisis korelasi pearson. Berikut ini adalah hasil pengolahan *software SPSS 28* untuk koefisien korelasi mengenai hubungan antara Kebijakan PPKM Darurat dengan Opini Publik.

Gambar 3
Hasil Korelasi Pearson dari SPSS

		KEBIJAKAN PPKM DARURAT	OPINI PUBLIK
KEBIJAKAN PPKM DARURAT	Pearson Correlation	1	.502**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	104	104
OPINI PUBLIK	Pearson Correlation	.502**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	104	104

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengambilan Keputusan dalam Uji Korelasi Pearson:

- Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel Correlations diperoleh nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan PPKM Darurat (X) berkorelasi terhadap variabel Opini Publik (Y).
- Berdasarkan derajat hubungan : dari tabel Correlations diperoleh nilai Pearson Correlations sebesar 0.502. Dalam skala nilai Pearson Correlations 0,41 s/d 0,60 yaitu korelasi sedang (netral). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang (netral) antara hasil survey Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat dengan

Pembentukan Opini Publik.

- Jika angka signifikansi tepat di angka 0.05 bisa menggunakan alternatif lain dalam menentukan apakah ada hubungan atau tidak. Dengan cara membandingkan nilai Pearson Correlations dengan nilai t_{tabel} . Diketahui nilai Pearson Correlations penelitian $0,502 > 0.195$ (nilai t_{tabel}) maka terdapat hubungan diantara keduanya.

E. Kesimpulan

- 1) Penelitian yang berdasarkan kerangka teori *Policy Implementation* ini terfokus kepada pengaruh kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli terhadap pembentukan Opini Publik yang berefek kepada kebijakan, organisasi, dan lingkungan.
- 2) Pembentukan opini publik yang relevan dengan kebijakan, organisasi dan lingkungan ini tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja dan kepemimpinan pejabat, namun peneliti tetap membatasi pembahasan tersebut yang terfokus kepada kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli terhadap pembentukan Opini Publik.
- 3) Melalui uji hipotesis dihasilkan bahwa terdapat hubungan antara hasil *survey* mengenai Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli terhadap Pembentukan Opini Publik.
- 4) Melalui analisis korelasi pearson menyatakan bahwa hasil *survey* Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat dengan Pembentukan Opini Publik sebesar 0,41 s/d 0,60 yaitu korelasi sedang (netral).
- 5) Berdasarkan pembagian wilayah di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa PPKM Darurat 3-20 Juli memiliki persentase yang dapat mempengaruhi pembentukan opini publik di setiap pembagian wilayah di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Website Artikel:

<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/26/07452641/update-25-juni-kasus-aktif-covid-19-capai-angka-tertinggi-selama-pandemi>

<https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/19/update-kasus-covid-19-indonesia-19-juni-2021-tambah-12906-positif-7016-semuh-248-meninggal>

<https://tirto.id/penjelasan-satgas-soal-kenapa-relaksasi-ppkm-perlu-persiapan-matang-ghWg>

http://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=175

Buku & Jurnal :

Alkatiri1 dkk. (2020). *Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal Di Media Sosial Twitter*, CoverAge, Vol 11, 20-26

Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

Pujaningsih Ni Nyoman, Sucitawati P I.G.A.A.G Dewi. 2020. Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*, Vol 6, 458-470

Purwandini Putri Fitasari, 2017. Analisis Isi Opini Publik Tentang Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol 6, 65-74